



KEMENPKP
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I

DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN



2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Triwulan I Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman selama periode triwulan I yang telah berjalan, sesuai dengan amanat Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Dokumen ini memuat informasi mengenai target kinerja, capaian target, permasalahan dan potensi capaian triwulan, serta rencana tindak lanjut pada pelaksanaan program di bidang kawasan permukiman. Kami berharap laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi sekaligus sebagai masukan konstruktif dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola program serta pelayanan kepada masyarakat.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini, khususnya jajaran unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja triwulan I Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pada triwulan berikutnya.

Jakarta, 13 April 2026
Direktur Jenderal Kawasan Permukiman



Ir. Fitrah Nur, M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Tugas dan Fungsi.....	3
I.3 Struktur Organisasi	4
BAB II CAPAIAN KINERJA	7
II.1 Target Kinerja Triwulan I.....	7
II.2 Perhitungan Target Kinerja	18
II.3 Capaian Target Triwulanan I.....	24
II.4 Permasalahan	52
BAB III PENUTUP	58
III.1. Rencana Tindak Lanjut.....	58
LAMPIRAN.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Rincian Target Pencapaian Indikator Program Ditjen KP TA 2026	7
Tabel II. 2 Target Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Triwulan I	8
Tabel II. 3 Metode Perhitungan Kinerja	18
Tabel II. 4 Kategorisasi Capaian Kinerja	24
Tabel II. 5 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Ditjen Kawasan Permukiman Triwulan I34	

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Bagan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	4
--	---

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perumahan dan kawasan permukiman merupakan bagian dari hak dasar setiap Warga Negara Indonesia. Setiap individu memiliki hak untuk menempati hunian yang layak sebagai bagian dari kehidupan yang sejahtera, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, memiliki tempat tinggal, serta memperoleh lingkungan yang baik dan sehat, termasuk akses terhadap pelayanan kesehatan.

Komitmen negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas hunian yang layak juga ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam regulasi tersebut dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak menempati dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan tertata. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman guna memastikan pemenuhan hak tersebut, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap hunian layak.

Meskipun telah tersedia kerangka regulasi serta berbagai program pendukung, tantangan dalam pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman layak masih cukup besar. Tingginya angka backlog perumahan, berkembangnya kawasan kumuh, serta ketimpangan akses terhadap infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, dan drainase menjadi permasalahan yang masih dihadapi di berbagai daerah. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2023, terdapat sekitar 9,9 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah (backlog kepemilikan) dan 26,9 juta rumah tangga yang masih menempati rumah tidak layak huni (backlog kelayakan). Kondisi ini semakin diperparah oleh laju urbanisasi yang tidak terkendali, keterbatasan ketersediaan lahan, serta perbedaan kapasitas antarwilayah dalam penyediaan layanan permukiman.

Sebagai upaya menjawab berbagai tantangan tersebut, pemerintah menetapkan program prioritas pembangunan yang berfokus pada percepatan capaian nyata di sektor strategis, termasuk perumahan dan kawasan permukiman.

Pembangunan diarahkan pada penyediaan hunian yang layak, terjangkau, serta dilengkapi dengan akses sanitasi yang memadai, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Kebijakan ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 yang menargetkan peningkatan proporsi rumah tangga dengan akses terhadap hunian layak dan berkelanjutan, dari 67% pada tahun 2025 menjadi 74% pada tahun 2029. Selain itu, pembangunan permukiman juga difokuskan pada percepatan penyediaan hunian bagi MBR, penanganan kawasan kumuh, serta peningkatan layanan infrastruktur dasar melalui pendekatan yang adaptif dan kolaboratif.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Peraturan Menteri PKP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman untuk melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman. Fokus utamanya adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan permukiman, termasuk fasilitasi penyiapan lahan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum, pembinaan usaha perumahan dan perlindungan konsumen, serta pembinaan teknik perumahan.

Kebijakan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman diarahkan pada peningkatan jumlah hunian layak sekaligus percepatan penanganan kawasan kumuh melalui penguatan ekosistem perumahan dan permukiman yang terpadu, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sasaran program dibagi dalam dua pilar utama, yaitu Program Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Program Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan. Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun 2025–2029, capaian program diukur melalui tiga indikator utama, yakni: persentase peningkatan hunian layak di kawasan permukiman; (2) persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh; serta (3) persentase peningkatan ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan tidak hanya intervensi pemerintah, tetapi juga kolaborasi yang kuat dengan masyarakat, sektor swasta, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya guna mewujudkan permukiman yang inklusif, sehat, dan berkelanjutan.

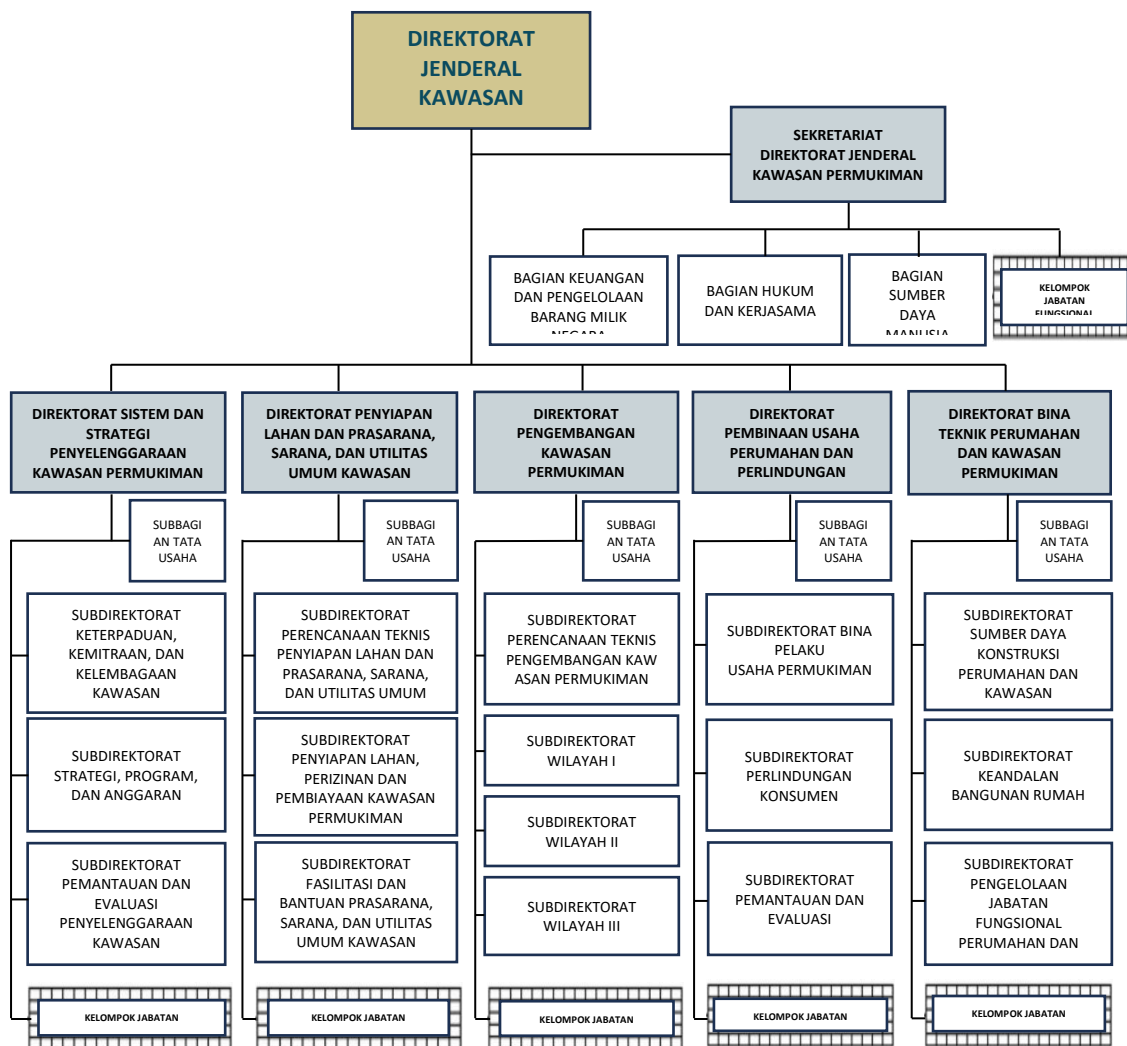
I.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya dijabarkan melalui Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman maka tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman antara lain sebagai berikut. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, fasilitasi penyiapan lahan dan prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan permukiman, pembinaan usaha perumahan dan perlindungan konsumen, serta pembinaan teknik perumahan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, fasilitasi penyiapan lahan dan prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan permukiman, pembinaan usaha perumahan dan perlindungan konsumen, serta pembinaan teknik perumahan;
3. Bidang pengembangan kawasan permukiman, fasilitasi penyiapan lahan dan prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan permukiman, pembinaan usaha perumahan dan perlindungan konsumen, serta pembinaan teknik perumahan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kawasan permukiman, fasilitasi penyiapan lahan dan prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan permukiman, pembinaan usaha perumahan dan perlindungan konsumen, serta pembinaan teknik perumahan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan permukiman, fasilitasi penyiapan lahan dan prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan permukiman, pembinaan usaha perumahan dan perlindungan konsumen, serta pembinaan teknik perumahan;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

I.3 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut.



Gambar I. 1 Bagan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman terdiri dari 6 Unit Kerja Eselon II dengan didukung oleh 19 Bagian/Subdirektorat, 5 Subbagian Tata Usaha beserta kelompok Jabatan Fungsional, serta 19 BP3KP dan 36 Satuan Kerja PKP. Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman sebanyak 2.056 orang dengan penempatan di Kantor Pusat maupun di UPT BP3KP/ Satker PKP.

Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal

Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman

Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan dan pengembangan strategi, penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan kemitraan dan kelembagaan, pengelolaan data dan sistem informasi, serta pemantauan dan evaluasi kinerja di bidang penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman

Direktorat Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman

Direktorat Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, rencana teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, koordinasi penyiapan lahan, perizinan, pembiayaan, fasilitasi kerja sama, koordinasi dan pelaksanaan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan permukiman, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan program dan anggaran, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pengembangan kawasan permukiman

Direktorat Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen

Direktorat Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan program dan anggaran, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pembinaan pelaku usaha perumahan dan perlindungan konsumen, serta evaluasi dan pelaporan.

Direktorat Bina Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman

Direktorat Bina Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pengelolaan sarana laboratorium dan peralatan pengujian, pembinaan sumber daya konstruksi perumahan dan kawasan permukiman, pembinaan teknik keandalan bangunan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta penyelenggaraan sistem informasi dan pengelolaan jabatan fungsional dan pengembangan profesi bidang perumahan.

BAB II CAPAIAN KINERJA

II.1 Target Kinerja Triwulan I

Target pencapaian kinerja program Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman adalah berdasarkan pada Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Awal Direktur Jenderal Kawasan Permukiman TA 2026. PK TA 2026 Ditjen Kawasan Permukiman merupakan perjanjian antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku pemberi tugas dengan Direktur Jenderal Kawasan Permukiman selaku pelaksana tugas yang memuat sasaran-sasaran strategis berdasarkan Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman.

PK Ditjen Kawasan Permukiman TA 2026 memuat program kegiatan Ditjen Kawasan Permukiman TA 2026 yang terdiri dari Program Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Dukungan Manajemen Infrastruktur Permukiman. Program kegiatan tersebut perlu dilaporkan setiap triwulan, dengan mencantumkan target dan realisasi capaian kinerja.

Target kinerja kegiatan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman pada program Ditjen Kawasan Permukiman TA 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel II. 1 Rincian Target Pencapaian Indikator Program Ditjen KP TA 2026

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Hunian Layak di Kawasan Permukiman	1	Persentase ketersediaan rumah layak huni	100%
		2	Persentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni	100%
2	Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh	1	Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh	100%
3	Meningkatnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak	1	Persentase peningkatan ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak	100%
4	Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PKP dan Tugas Teknis Lainnya	1	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP	86,26%

Target indikator kinerja kegiatan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) TA 2026 mengacu pada DIPA Ditjen Kawasan Permukiman Revisi 1 yang terbit pada tanggal 29 Desember 2025. PK Dirjen Kawasan Permukiman Tahun 2026 menyebutkan bahwa Ditjen Kawasan Permukiman memiliki 4 (empat) Sasaran Program, di antaranya Meningkatnya Hunian Layak di Kawasan Permukiman, Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh, Meningkatnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, serta Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PKP dan Tugas Teknis Lainnya.

Adapun rincian target triwulanan Ditjen Kawasan Permukiman Tahun 2026 adalah sebagai berikut.

Tabel II. 2 Target Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Triwulan I

No	Kode	Program/Kegiatan/Output		Satuan	Target Tahun 2026	TW I	Pagu (Rp)
						TARGET FISIK	
	Program	Perumahan dan Kawasan Permukiman					
	SP-1	Meningkatnya Hunian Layak di Kawasan Permukiman					
	IKSP-1	Persentase ketersediaan rumah layak huni		%	100	0,06	
	IKSP-2	Persentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni		%	100	0,08	
	K-1	Penyelenggaraan Sistem dan Strategi Kawasan Permukiman					
	SK-1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni					
		IKK.1 Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni		%	100	0.00	
			7659.ABF.001 Kebijakan dan Strategi Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RO 2025)	Rekomendasi Kebijakan	2	0	1.631.966.000

No	Kode	Program/Kegiatan/Output	Satuan	Target Tahun 2026	TW I	Pagu (Rp)
					TARGET FISIK	
		7659.PBF.001 Kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	Rekomendasi Kebijakan	20	0	2.440.576.000
		7659.BMA.001 Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Dokumen	19	0	1.189.734.000
		7659.FAE.001 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Laporan	2	0	643.095.000
		IKK.2 Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi melalui intervensi tidak langsung di wilayah pesisir	%	100	0	
		7659.BMA.001 Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Dokumen	19	0	1.189.734.000
		Jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan di wilayah pesisir yang difasilitasi dengan sumber dana di luar APBN Kementerian PKP (unit)		-	-	
		IKK.3 Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah pesisir	%	100	0,08	
		7659.ABF.001 Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	%	100	0,08	1.631.996.000
		realisasi desa di wilayah pesisir yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Ditjen Kawasan Permukiman (Unit BSPS)	Unit	120.000*	100	
		7659.ABF.001 Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		54	0	1.631.996.000

No	Kode	Program/Kegiatan/Output		Satuan	Target Tahun 2026	TW I	Pagu (Rp)
						TARGET FISIK	
			Capaian Renstra Ditjen Kawasan Permukiman 2025-2029 dan Kontribusi Unor terhadap Capaian RPJMN 2025-2029 realisasi desa di wilayah pesisir yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Ditjen Kawasan Permukiman hingga memenuhi desa 100% RLH	Desa	54	0.00	
	K-2	Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Kawasan Permukiman					
	SK-2	Meningkatnya perencanaan, fasilitasi penyiapan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan permukiman					
		IKK.1 Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi penyiapan lahan serta PSU		%	100	0.00	
			7659.ABF.003 Kebijakan Fasilitasi Penyiapan Lahan dan PSU Kawasan Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	0	1.123.066.000
			7659.CBR.001 Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Fasilitasi PSU	Dokumen	2	0	2.470.553.000
			7659.FAE.002 Pemantauan dan Evaluasi Penyiapan Lahan dan PSU Kawasan Permukiman	Laporan	2	0	1.422.777.000
			7659.AFA.002 Penyusunan NSPK Bidang Penyiapan Lahan dan PSU Kawasan Permukiman	NSPK	0	0	0
			7659.PEA.001 Koordinasi dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Kawasan Permukiman	Kegiatan	1	0.00	299.203.000
		IKK.2 Persentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum*		%	100	0.00	
			7659.RBB.001 Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	Unit	807	0	10.524.600.000

No	Kode	Program/Kegiatan/Output		Satuan	Target Tahun 2026	TW I	Pagu (Rp)
						TARGET FISIK	
		IKK.3 Persentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum hunian vertikal		%	-	-	
			7659.RBB.004 PSU Hunian Vertikal di Kawasan Permukiman	Unit	-	-	0
		IKK.4 Persentase rumah tangga yang terfasilitasi skema pembiayaan perumahan yang terjangkau		%	100	8,23	
			7659.PEA.001 Koordinasi dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Kawasan Permukiman	Kegiatan	1	0	
			(BA BUN) Jumlah Rumah Tangga yang Menerima Fasilitas Pembiayaan Perumahan/ Bantuan Subsidi/ Kemudahan Perumahan 457.025 Unit selama 5 tahun	Unit	95.800	15.770	
	K-3	Penyediaan Rumah Layak Huni					
	SK-3	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman					
		IKK.1 Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas		%	100	0,04	
			7659.RBB.008 Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	Unit	120.000	100	2.670.000.000.000
			7659.RBB.007 Rumah Bersanitasi Layak di Kawasan Permukiman	Unit	1.000	0	10.800.000.000
		IKK.2 Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui pembangunan baru		%	100	0.00	
			7659.RBB.005 Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	Unit	0	0	0
		IKK.3 Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi peningkatan kualitas rumah dan pengembangan kawasan permukiman		%	100	5	4.156.500.000
			7659.ABF.004 Kebijakan Penyelenggaraan Penanganan Kumuh dan	Rekomendasi kebijakan	1	0	765.411.000

No	Kode	Program/Kegiatan/Output		Satuan	Target Tahun 2026	TW I	Pagu (Rp)
						TARGET FISIK	
			Pengembangan Kawasan Permukiman				
			7659.AFA.003 Penyusunan NSPK Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman	NSPK	1	0	265.251.000
			7659.BMA.003 Data dan Informasi Kawasan Permukiman Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Dokumen	1	0	161.064.000
			7659.CBR.002 Dukungan Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Dokumen	3	0	2.280.553.000
			7659.FAE.003 Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	Laporan	4	1	2.616.142.000
	K-4	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman					
	SK-4	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman					
		IKK.1 Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui pembangunan baru (Rumah Khusus)*		%	100	0.00	
			7659.RBB.003 Rumah Khusus Kawasan Pesisir	Unit	244	0	80.625.340.000
		IKK.2 Persentase Peningkatan penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu (Rumah Susun)*		%	100	0.00	
			7659.RBB.004 Pembangunan Rumah Susun*	Unit	85	0	36.000.000.000
	SP-2	Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh					
	IKSP	Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh		%	100	10.00	
	K-1	Penanganan Permukiman Kumuh					
	SK-1	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu					
		IKK.1 Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu		%	100	0.00	
			7659.RBB.006 Penanganan Permukiman Kumuh	Hektar	75	0	46.755.740.000

No	Kode	Program/Kegiatan/Output		Satuan	Target Tahun 2026	TW I	Pagu (Rp)
						TARGET FISIK	
	SP-3	Meningkatnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak					
	IKSP	Persentase peningkatan ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak		%	100	16,67	
	IKSP-1	Persentase pelaku usaha perumahan anggota asosiasi pelaku usaha perumahan yang teregister dan terbina		%	100	25	
	IKSP-2	Persentase Layanan Fasilitas Pengaduan Konsumen Perumahan		%	100	25	
	IKSP-3	Persentase peningkatan kualitas pembinaan teknis dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman		%	100	0.00	
	K-1	Dukungan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman					
	SK-1	Meningkatnya pembinaan pelaku usaha perumahan dan perlindungan konsumen perumahan					
		IKK.1 Persentase asosiasi pelaku usaha perumahan yang teregister dan terbina		%	100	50.00	
			7659.BDB.001 Pembinaan Lembaga Pelaku Usaha Bidang Perumahan dan Fasilitas Bimbingan Teknis Konsumen Perumahan	Lembaga	4	4	1.082.593.000
			7659.ABF.006 Kebijakan Teknis, Standar dan Kriteria Pembinaan Pelaku Usaha Perumahan dan Pemangku Kepentingan Lainnya di Bidang Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	0	431.963.000
		IKK.2 Tingkat pencapaian pelaksanaan dan pemantauan penyelenggaraan layanan bantuan teknis dalam rangka perlindungan konsumen perumahan		%	100	85	
			Persentase pengaduan masyarakat yang dilayani	%	100	100	
			7659.AEA.001 Koordinasi Tindak Lanjut Pengaduan Konsumen Perumahan	Kegiatan	1	1	744.211.000

No	Kode	Program/Kegiatan/Output		Satuan	Target Tahun 2026	TW I	Pagu (Rp)
						TARGET FISIK	
			7659.ABF.005 Kebijakan, Strategi dan Program Bidang Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen	Rekomendasi Kebijakan	1	0	134.407.000
			7659.ABF.006 Kebijakan Teknis, Standar dan Kriteria Pembinaan Pelaku Usaha Perumahan dan Pemangku Kepentingan Lainnya di Bidang Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	0	431.963.000
			7659.AEA.002 Koordinasi Antar Instansi/Lembaga Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Perumahan	Kegiatan	1	1	236.670.000
			7659.FAE.004 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Usaha Perumahan dan Konsumen serta Pelaporan Kinerja	Laporan	2	0	235.746.000
	SK-2	Meningkatnya kualitas pembinaan teknis dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman					
		IKK.1 Persentase rekomendasi kebijakan teknis pengembangan teknologi bangunan perumahan dan kawasan permukiman		%	100	0.00	
			7659.ABF.007 Kebijakan Teknis Pengembangan Teknologi Bangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RO 2025)	Rekomendasi Kebijakan	1	0	248.137.000
		IKK.2 Persentase regulasi (NSPK) bidang perumahan dan kawasan permukiman		%	100	0.00	
			7659.AFA.002 Penyusunan NSPK Bina Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman	NSPK	1	0	356.512.000
		IKK.3 Persentase dukungan pengembangan teknologi dan pengelolaan infrastruktur bidang perumahan dan kawasan permukiman		%	100	0.00	
			7659.CBR.003 Dokumen Dukungan Teknis Pengembangan Teknologi dan Pengelolaan Infrastruktur Bidang	Dokumen	4	0	1.098.704.000

No	Kode	Program/Kegiatan/Output		Satuan	Target Tahun 2026	TW I	Pagu (Rp)
						TARGET FISIK	
			Perumahan dan Kawasan Permukiman				
			jumlah dokumen dukungan teknis pengembangan teknologi bidang perumahan dan kawasan permukiman	Dokumen	1	0	
			jumlah dokumen dukungan teknis pengelolaan infrastruktur bidang perumahan dan kawasan permukiman	Dokumen	3	0	
		IKK.4 Persentase peningkatan kapasitas ASN pejabat fungsional bidang perumahan dan kawasan permukiman		%	100	0.00	
			7659.DCB.001 Peningkatan Kompetensi Teknis Bidang Perumahan dan Permukiman	Orang	200	0	484.616.000
			Jumlah ASN (JF PKP dan non JF PKP) yang mendapatkan peningkatan kompetensi teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman	Orang	150	0	
			Jumlah Penyelenggara Konstruksi yang mendapatkan peningkatan kompetensi teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman	Orang	50	0	
		IKK.5 Persentase hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan teknologi dan akuntabilitas kinerja		%	100	0.00	
			7659.FAE.005 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Teknologi dan Akuntabilitas Kinerja	Laporan	1	0	201.337.000
	Program	Dukungan Manajemen					
	SP-1	Meningkatnya Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman					
	IKSP	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman		%	86.26	21.57	
	IKSP-1	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan		%	74.1	18.53	117.320.000

No	Kode	Program/Kegiatan/Output		Satuan	Target Tahun 2026	TW I	Pagu (Rp)
						TARGET FISIK	
			7674.EBD.Z33 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Layanan	1		
	IKSP-2	Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN		%	72.38	18.10	8.738.822.000
			7674.EBA.Z06 Layanan BMN	Layanan	20		
			7674.EBA.994 Layanan Perkantoran	Layanan	1		
			7674.EBB.951 Layanan Sarana Internal	Unit	106		
	IKSP-3	Tingkat layanan pembentukan produk hukum		%	82.1	20.53	630.560.000
			7674.EBA.Z01 Layanan Hukum	Layanan	1		
	IKSP-4	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana		%	75	18.75	932.415.000
			7674.EBC.996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Layanan	1		
			7674.EBA.Z08 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1		
			7674.EBC.Z10 Layanan Manajemen SDM	Layanan	37		
	IKSP-5	Nilai Kinerja Anggaran		%	88.5	22.13	4.495.647.000
			7674.EBA.962 Layanan Umum	Layanan	61		
			7674.EBD.Z23 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	1		
			7674.EBD.Z26 Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	1		
	IKSP-6	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI		%	100	25.00	424.283.000
			7674.EBD.Z26 Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	1		
	IKSP-7	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi		%	92.3	23.08	100.000.000
			7674.EBD.Z24 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan	1		
	IKSP-8	Tingkat Layanan Komunikasi Publik		%	86.25	21.56	444.320.000
			7674.EBA.963 Layanan Data dan Informasi	Layanan	19		
	IKSP-9	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi		%	100	25.00	180.091.000

No	Kode	Program/Kegiatan/Output		Satuan	Target Tahun 2026	TW I	Pagu (Rp)
						TARGET FISIK	
			7674.EBD.Z31 Layanan Reformasi Kinerja	Layanan	1		
	IKSP-10	Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP		%	92	23.00	197.400.000
			7674.EBD.Z31 Layanan Reformasi Kinerja	Layanan	1		
	K-1	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman					
	SK-1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman		%	87.8		
		IKK.1 Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		%	72.38	18.10	
			7674.EBA.Z06 Layanan BMN	Layanan	20		
			7674.EBA.994 Layanan Perkantoran	Layanan	1		
			7674.EBB.951 Layanan Sarana Internal	Unit	106		
		IKK.2 Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		%	100.00	25.00	
			7674.EBC.996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Layanan	1		
			7674.EBA.Z08 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1		
			7674.EBC.Z10 Layanan Manajemen SDM	Layanan	37		
		IKK.3 Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		%	88.50	22.13	
			7674.EBA.962 Layanan Umum	Layanan	61		
			7674.EBD.Z23 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	1		
			7674.EBD.Z26 Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	1		
		IKK.4 Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI		%	100	25.00	
			7674.EBD.Z26 Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	1		
		IKK.5 Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		%	92.30	23.08	
			7674.EBD.Z24 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan	1		
		IKK.6 Tingkat Layanan Komunikasi Publik		%	86.25	21.56	

No	Kode	Program/Kegiatan/Output		Satuan	Target Tahun 2026	TW I	Pagu (Rp)
						TARGET FISIK	
			7674.EBA.Z02 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	1		
		IKK.7 Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan		%	74.10	18.53	
			7674.EBD.Z33 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Layanan	1		
		IKK.8 Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum		%	82.10	20.53	
			7674.EBA.Z01 Layanan Hukum	Layanan	1		
		IKK.9 Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP		%	92.00	23.00	
			7674.EBD.Z31 Layanan Reformasi Kinerja	Layanan	1		

Pada Triwulan I Tahun 2026, terdapat revisi anggaran sebanyak 2 (dua) kali yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. DIPA Revisi 1 tidak terdapat perubahan pada anggaran dari DIPA Awal sebesar Rp2.938.322.882.000, namun terdapat pergeseran anggaran Antar KRO/RO/Akun dan Blokir RO Khusus FAN.ZZ1 sebesar Rp45.216.130.000.
2. DIPA Revisi 2 Pergeseran Anggaran antar Satker/KRO/RO/Akun serta Buka Blokir Kode 02, dengan Pagu tetap (tidak berubah) sebesar Rp2.938.322.882.000. Pagu Blokir Kode 02 semula Rp2.774.080.340.000 menjadi Rp1.345.202.118.000 (Buka blokir sebesar Rp1.428.878.222.000).

II.2 Perhitungan Target Kinerja

Perhitungan persentase pencapaian target baik dalam pencapaian kegiatan maupun pencapaian sasaran memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi sebagai berikut.

PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Metode Perhitungan Target Kinerja Sasaran Program 1

Tabel II. 3 Metode Perhitungan Kinerja

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET	METODE PERHITUNGAN
1	Meningkatnya Hunian Layak di Kawasan Permukiman	1	Persentase ketersediaan rumah layak huni	100%	Capaian dihitung dari penjumlahan indikator berikut:
					Persentase hunian layak dan terjangkau melalui Intervensi langsung (bobot 70%)

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET	METODE PERHITUNGAN									
					Capaian dihitung dari perbandingan realisasi intervensi langsung di wilayah pesisir terhadap target tahunan, yaitu: Intervensi langsung (menggunakan APBN Kementerian PKP) adalah: Rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta bantuan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan di wilayah pesisir Capaian (%) = $100 \times ((U+V+W+X)/B)$ Keterangan: U: Realisasi rumah khusus (unit) V: Realisasi bantuan rumah swadaya (unit) W: Realisasi rumah susun (unit) B: Target tahun 2026 (DIPA) sebagai berikut: Rusun: 85 Rumah Swadaya: 120.000 unit Rusun: 244 Total: 120.329 b. Persentase hunian layak dan terjangkau melalui Intervensi tidak langsung (bobot 10%) Capaian dihitung dari perbandingan realisasi intervensi tidak langsung di wilayah pesisir terhadap target tahunan, yaitu: Jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi dengan sumber dana diluar APBN Kementerian PKP (unit). $A= 100\% \times (P/B)$ Keterangan: A: Capaian Kinerja (%) Intervensi langsung P: Realisasi rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan di wilayah pesisir yang difasilitasi dengan sumber dana diluar APBN Kementerian PKP (unit) B: Target intervensi tidak langsung (unit) sebagai berikut: Target intervensi langsung dan tidak langsung sebagai berikut: <table><tr><td>2025: - unit</td><td>2027: 514.067 unit</td><td>2029: 764.867 unit</td></tr><tr><td>2026: 490.463 unit</td><td>2028: 518.000 unit</td><td>Total</td></tr><tr><td colspan="3">2025-2029: 2.287.396 unit</td></tr></table>	2025: - unit	2027: 514.067 unit	2029: 764.867 unit	2026: 490.463 unit	2028: 518.000 unit	Total	2025-2029: 2.287.396 unit		
2025: - unit	2027: 514.067 unit	2029: 764.867 unit												
2026: 490.463 unit	2028: 518.000 unit	Total												
2025-2029: 2.287.396 unit														

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	METODE PERHITUNGAN
				c. Persentase unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) (bobot 20%) Capaian dihitung dari perbandingan realisasi jumlah unit rumah di wilayah pesisir yang menerima bantuan PSU tapak dan vertikal terhadap target tahunan. $A = 100 \times ((P+Q)/B)$ Keterangan: A: Capaian Kinerja (%) P: Realisasi Rumah di wilayah pesisir yang mendapat Bantuan PSU tapak (unit) Q: Realisasi Rumah di wilayah pesisir yang mendapat Bantuan PSU vertikal (unit) B: Target tahunan PSU Tapak (Unit) dan PSU Vertikal (unit) sebagai berikut: PSU Tapak 2026: 807 PSU Vertikal 2026:0 Total PSU Tapak + PSU Vertikal: 2026: 807
				Capaian dihitung dari penjumlahan indikator berikut: a. Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di kawasan permukiman (bobot 90%) Capaian dihitung dari realisasi desa di wilayah pesisir yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Ditjen Kawasan Permukiman terhadap target tahunan dikali 100%. $\text{Capaian (\%)} = 100 \times (\text{realisasi}/\text{target})$ Target tahunan (Renstra): 2025-2029: 54 desa/tahun Total: 225 desa b. Persentase desa yang memiliki 100% RLH (bobot 10%). Capaian Renstra Ditjen Kawasan Permukiman 2025-2029 Capaian dihitung dari perbandingan realisasi desa di wilayah pesisir yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Ditjen Kawasan Permukiman hingga memenuhi desa 100% RLH terhadap target tahunan. $A = 100 \times ((U)/B)$ A= Capaian (%) B= Target penanganan jumlah desa tahunan (desa) U= Realisasi jumlah desa yang diintervensi oleh Ditjen Kawasan Permukiman(desas) Target tahunan (Renstra): 2025-2029: 54 desa/ tahun Total: 225 desa Kontribusi Unor terhadap Capaian RPJMN 2025-2029 Capaian dihitung dari perbandingan realisasi desa di wilayah pesisir yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Ditjen Kawasan Permukiman hingga memenuhi desa 100% RLH terhadap target penanganan selama 2025-2029 yaitu 750 desa. $A = Y + \{(((U)/B)) \times 100\} \times (Z - Y)$ A= Capaian (%) B= Target penanganan jumlah desa secara nasional yaitu 750 desa U= Realisasi jumlah desa yang diintervensi oleh Ditjen Kawasan Permukiman (desa)
		2	Persentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni	100%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	METODE PERHITUNGAN
				Y= Baseline penanganan 2024 (24,81%) Z= Target penanganan pada 2029 (25,61%) Target tahunan (Renstra) (%): 2025-2029: 54 desa/ tahun Total: 225 desa 2025: 24,86 % 2026: 24,90% 2027: 24,94% 2028: 24,97% 2029: 25,00% Total: 25,00%

Metode Perhitungan Target Kinerja Sasaran Program 2

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	METODE PERHITUNGAN
2	Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh	1 Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh	100%	Capaian dihitung dari perbandingan luasan kumuh tertangani terhadap target luasan kumuh yang ditangani setiap tahun. Capaian penanganan kumuh DJKP: $100 \times (U/V)$ A: Capaian Kinerja sebagai Pelaksana (%) U: Realisasi Ha luasan penanganan kumuh di wilayah pesisir (Ha) V: Target luasan penanganan kumuh di wilayah pesisir (Ha) Target tahunan sebagai pelaksana (Ha): 2026: 75 Ha

Metode Perhitungan Target Kinerja Sasaran Program 3

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	METODE PERHITUNGAN
3	Meningkatnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak	1 Persentase peningkatan ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak --- dihitung dari rerata gabungan indikator:	100%	Capaian dihitung dari rerata perbandingan realisasi jumlah indikator kontributor terhadap target tahunan: Keterangan: Capaian Kinerja (%) = $100 \times (\text{realisasi}/\text{target})$
		1 Persentase pelaku usaha perumahan anggota asosiasi pelaku usaha perumahan yang teregister dan terbina	100%	Capaian dihitung dari penjumlahan indikator sebagai berikut: $Y = (80\% \times A) + (20\% \times B)$ a. Persentase pelaku usaha perumahan yang teregister. (bobot 80%) Capaian dihitung dari perbandingan realisasi jumlah pelaku usaha perumahan teregister terhadap total pelaku usaha yang tergabung pada 4 asosiasi dengan jumlah anggota terbanyak (target) $A = 100 \times (p/q)$ A = capaian kinerja (%) p = jumlah pelaku usaha perumahan yang teregister dari 4 asosiasi dengan anggota terbanyak (lembaga) q = total anggota dari 4 asosiasi dengan anggota terbanyak (lembaga)

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET	METODE PERHITUNGAN	
					b. Persentase pemahaman pelaku usaha perumahan yang dibina. (bobot 20%) Capaian dihitung dari perbandingan jumlah pelaku usaha peserta bimbingan teknis yang memperoleh nilai ≥ 70 terhadap total pelaku usaha peserta bimbingan teknis. $B = 100 \times (p/q)$ B = capaian kinerja (%) p = jumlah pelaku usaha peserta bimbingan teknis yang memperoleh nilai ≥ 70 (lembaga) q = total pelaku usaha peserta bimbingan teknis (lembaga) *) keterangan: nilai ≥ 70 diperoleh dari hasil test yang dilakukan pada sesi akhir kegiatan bimbingan teknis	
		2	Persentase Layanan Fasilitasi Pengaduan konsumen perumahan	100%	Dihitung dari persentase tingkat layanan kanal pengaduan konsumen perumahan $A = 100 \times (p/q)$ A = capaian kinerja (%) p = jumlah aduan konsumen perumahan pada BENAR PKP yang terlayani q = total aduan konsumen perumahan yang masuk pada BENAR PKP	
		3	Persentase peningkatan kualitas pembinaan teknis dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	100%	Capaian dihitung dari rerata perbandingan realisasi jumlah indikator kontributor terhadap target tahunan:	
					a	Capaian dihitung dari perbandingan realisasi jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan teknologi bangunan perumahan dan kawasan permukiman terhadap target setiap tahun (ABF 007). Dihitung dengan rumus: Capaian (%) = (Realisasi/Target) x 100 Target tahunan DIPA (rekomendasi kebijakan): 2026: 1
					b	Capaian dihitung dari perbandingan realisasi jumlah NSPK bidang perumahan dan kawasan permukiman terhadap target setiap tahun. (AFA 002) Dihitung dengan rumus: Capaian (%) = (Realisasi/Target) x 100 Target tahunan DIPA (NSPK): 2026: 1
c	Capaian dihitung dari perbandingan realisasi jumlah dokumen dukungan teknis pengembangan teknologi bidang perumahan dan kawasan permukiman dan jumlah dokumen dukungan teknis pengelolaan infrastruktur bidang perumahan dan kawasan permukiman terhadap target setiap tahun. (CBR.003) Dihitung dengan rumus: Capaian (%) = (Realisasi/Target) x 100 Target tahunan DIPA (dokumen): 2026: 4					
d	Capaian dihitung dari perbandingan realisasi jumlah ASN (JF PKP dan non JF PKP) dan jumlah Penyelenggara Konstruksi yang mendapatkan peningkatan kompetensi teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman terhadap target setiap tahun. (DCB 001) Dihitung dengan rumus: Capaian (%) = (Realisasi/Target) x 100					

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	METODE PERHITUNGAN
				Target tahunan DIPA (orang): 2026: 200
				e Capaian dihitung dari perbandingan realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan teknologi dan akuntabilitas kinerja terhadap target setiap tahun. (FAE 005) Dihitung dengan rumus: Capaian (%) = (Realisasi/Target) x 100 Target tahunan DIPA (Laporan): 2026: 1

PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN

Metode Perhitungan Target Kinerja Sasaran Program

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	METODE PERHITUNGAN
4	Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PKP dan Tugas Teknis Lainnya	1 Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP	86,26%	Diukur dari sub indikator: 1. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan (10%) 2. Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN (10%) 3. Tingkat layanan pembentukan produk hukum (10%) 4. Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana (10%) 5. Nilai Kinerja Anggaran (10%) 6. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI (5%) 7. Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi (10%) 8. Tingkat Layanan Komunikasi Publik (10%) 9. Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi (10%) 10. Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko (10%) 11. Tingkat layanan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan (5%)

Berdasarkan metode pengukuran kinerja untuk setiap Sasaran Program (SP) yang telah disampaikan pada tabel II.3 diatas, selanjutnya akan dilakukan perhitungan capaian kinerja atas target pada triwulan II untuk Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman yang akan disampaikan pada bagian dibawah ini.

II.3 Capaian Target Triwulanan I

Target kinerja yang telah tertuang di dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman tahun 2026, secara keseluruhan dilaksanakan sepanjang tahun 2026. Evaluasi kinerja dilaksanakan dengan mengacu kepada kegiatan dan indikator kinerja yang sudah tercantum di dalam PK tersebut. Target pencapaian kinerja program dilakukan secara bertahap setiap triwulan, dengan mencantumkan target dan realisasi capaian kinerja. Sehingga dapat diketahui kegiatan mana yang sesuai atau tidak sesuai dengan target kinerja. Apabila terdapat ketidaksesuaian maka hal tersebut dapat diidentifikasi melalui kendala dan permasalahan. Selanjutnya dilakukan tindak lanjut atas kendala dan permasalahan yang dihadapi. Sehingga ke depan dapat dilakukan perbaikan atau peningkatan kinerja yang lebih optimal.

Capaian kinerja kegiatan triwulan ke I merupakan realisasi dari pelaksanaan target kinerja yang telah ditentukan sebelumnya pada dokumen Rencana Aksi dengan mengacu pada dokumen PK yang berlaku. Triwulan ke I adalah pelaksanaan kegiatan pada bulan Januari sampai dengan Maret 2026. Untuk melakukan identifikasi terhadap capaian kinerja, maka dilakukan pengelompokan atau penyusunan kategori capaian kinerja berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu Permen PAN & RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun kategorisasi capaian kinerja adalah sebagai berikut.

Tabel II. 4 Kategorisasi Capaian Kinerja

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik
4	B	>60 – 70	Baik, perlu sedikit perbaikan pada unit kerja
5	CC	>50 – 60	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan tidak mendasar, akuntabilitas unit kerja
6	C	>30 – 50	Kurang, perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan mendasar di level pusat
7	D	0 – 30	Sangat Kurang, perlu perbaikan yang sangat mendasar2 khususnya dalam implementasi SAKIP

Capaian kinerja triwulan ke I Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman terdiri dari beberapa kegiatan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
 - a. Penyusunan Revisi Permen RP3KP telah dilakukan FGD pembahasan awal penyusunan pedoman RP3KP tanggal 25 Februari 2026
 - b. Pembahasan Kerjasama (MOU dan PKS) dengan Kementerian KKP dan BNPP dalam proses finalisasi substansi dengan Biro Hukum Sekjend Kementerian PKP
 - c. Pelaksanaan Revisi Anggaran Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman TA 2026, Pagu Tetap Rp2,938T: Revisi Buka Blokir Anggaran Kegiatan Fisik; Usulan revisi tambahan anggaran untuk Kebutuhan Penanganan Pasca Bencana Sumatera
 - d. Penyusunan Angka Dasar (Ranwal Renja) Program dan Anggaran Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman TA 2027 sebesar Rp5,558T
2. Pelaksanaan kegiatan Kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman
 - a. Layanan Klinik PKP yang terlaksana di seluruh Balai P3KP sebanyak 5.673 layanan
3. Pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
 - a. Penyampaian Laporan Data dan Informasi Capaian 3 juta rumah: rumah baru dan/atau renovasi rumah tidak layak huni di Kawasan Permukiman pada Triwulan I sejumlah 14.624 unit yang bersumber dari realisasi FLPP dan PPNDTP
 - b. Telah dilaksanakan Diskusi Potensi Pembiayaan Perumahan bersama PT SMI
 - c. Penyepakatan Target Kinerja Triwulan DJKP TA 2026 dengan Biro PKS
4. Pelaksanaan kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja
 - a. Telah dilakukan Penyepakatan Capaian Output Kinerja DJKP TA 2025
5. Pelaksanaan kegiatan Kebijakan Fasilitasi Penyiapan Lahan dan PSU Kawasan Permukiman
 - a. Pelaksanaan Revisi Anggaran Ke-2 dan Ke-3 TA 2026
 - b. Penyusunan Anggaran TA 2027

- c. Penyusunan Laporan Pendahuluan Penyusunan Program dan Anggaran Bidang Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman
 - d. Penyusunan Laporan Pendahuluan Sinkronisasi Strategi Pendataan dan Penyebaran Informasi Kebijakan Bantuan Pengembangan Permukiman
6. Pelaksanaan kegiatan Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Fasilitas PSU
 - a. Rapat Koordinasi Awal Pelaksanaan Bantuan Pembangunan PSU TA 2026
 - b. Rapat Koordinasi Penyepakatan Wilayah Alokasi Perencanaan Bantuan Pembangunan PSU TA 2026
 - c. Pendampingan Pelaksanaan Verifikasi Lokasi Huntap bagi Masyarakat terdampak Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki
7. Pelaksanaan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyiapan Lahan dan PSU Kawasan Permukiman
 - a. Penyusunan Laporan Pendahuluan Penyusunan LAKIP Penyiapan Lahan dan PSU Kawasan Permukiman
8. Pelaksanaan kegiatan Penyusunan NSPK Bidang Penyiapan Lahan dan PSU Kawasan Permukiman
9. Pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan Kawasan Permukiman
 - a. Realisasi Penyaluran FLPP sebanyak 11.245 unit
 - b. Telah mengikuti koordinasi terkait pemanfaatan data realisasi FLPP
 - c. Pelaksanaan Koordinasi dan Pemantauan berkala dengan BP Tapera dan melalui Dashboard Ekosistem Pembiayaan Perumahan BP Tapera
10. Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan pembangunan PSU
 - a. Penyampaian Surat Instruksi Pelaksanaan Verifikasi Usulan Bantuan PSU TA 2026 tanggal 27 Februari 2026 pada SIBARU sebanyak 44.136 unit
11. Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman

- a. Penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Nomor 02/KPTS/Dp/2026 tentang Lokasi Kabupaten/Kota Kegiatan BSPS pada Ditjen KP TA 2026 tanggl 22 Januari 2026
 - b. Penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Nomor 03/KPTS/Dp/2026 tentang Lokasi Kabupaten/Kota Kegiatan BSPS pada Ditjen KP TA 2026 tanggl 22 Januari 2026
 - c. Penyampaian Surat Instruksi Verifikasi CPB Kegiatan BSPS TA. 2026 Wilayah Kerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman sebanyak 14.354 Unit
12. Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sanitasi layak di kawasan permukiman
13. Pelaksanaan kegiatan Kebijakan Penyelenggaraan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman
14. Pelaksanaan kegiatan Penyusunan NSPK Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman
- a. Penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Nomor 01/SE/Dp/2026 tentang Tata Cara Verifikasi Hasil Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
 - b. Penyampaian Rancangan Perubahan Pedoman Teknis Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Pedoman Teknis Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah kepada Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko
 - c. Penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Nomor 02/SE/Dp/2026 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
15. Pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen Data dan Informasi Kawasan Permukiman Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman
- a. Proses pengembangan aplikasi SIBANGKIM sebagai pusat data di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman
16. Pelaksanaan kegiatan Dukungan Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman
17. Pelaksanaan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Peningkatan Kualitas Rumah dan Penanganan Kumuh

- a. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan program Ditjen Kawasan Permukiman secara berkala mingguan dan bulanan
 - b. Laporan Pemantauan dan Evaluasi Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Triwulan I
18. Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan pembangunan Rumah Khusus Kawasan Pesisir
- a. Dukungan Percepatan Penetapan Lokasi dan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Hunian Tetap bagi Masyarakat Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki melalui Surat kepada Bupati Flores Timur
 - b. Dukungan terhadap Penanganan Hunian Tetap Pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat
19. Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan pembangunan Rumah Susun
- a. Penyusunan TOR dan RAB Pembangunan Rumah Susun
 - b. Permohonan Alokasi Bantuan Rumah Susun
20. Pelaksanaan kegiatan Penanganan Permukiman Kumuh
- a. Penyampaian Penetapan Lokasi Kegiatan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh dan Sanitasi TA 2026
21. Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Lembaga Pelaku Usaha Bidang Perumahan dan Fasilitasi Bimbingan Teknis Konsumen Perumahan
- a. Sosialisasi SE DJKP Nomor 52 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen Sektor Perumahan
 - b. Pelaksanaan Sosialisasi Permen PKP Nomor 18/2025 tentang Standar Kegiatan Usaha, Pelaksanaan Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perumahan
 - c. Pelaksanaan Pendampingan dan Sosialisasi Permen PKP Nomor 4/2025 tentang Pengelolaan Rumah Susun Milik serta Perhimpungan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun di 13 lokasi Rumah Susun Milik/Apartemen
22. Pelaksanaan kegiatan Kebijakan Teknis, Standar dan Kriteria Pembinaan Pelaku Usaha Perumahan dan Pemangku Kepentingan Lainnya di Bidang Perumahan
- a. Penyusunan Juknis PBBR sebagai turunan dari Permen PKP 18/2025

- b. Rancangan Permen PKP tentang Pembinaan Pelaku Usaha Sektor Perumahan dan Rancangan Permen PKP tentang Pengelolaan Rumah Tapak dapat menjadi pedoman Pelaku Usaha Sektor Perumahan dalam penyelenggaraan perumahan, dengan memastikan aspek perlindungan konsumen
23. Pelaksanaan kegiatan Koordinasi Tindak Lanjut Pengaduan Konsumen Perumahan
- a. Terlaksananya proses fasilitasi tindak lanjut pengaduan konsumen tahun 2025 sd 2026 sebanyak 1.964 dengan rincian jumlah perumahan 1.057 dan jumlah pengembang 990 dengan prosedur sesuai ketentuan dalam SE DJKP Nomor 52/2025 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen Sektor Perumahan
 - b. Fasilitasi pengaduan-pengaduan PPPSRS apartemen di DK Jakarta
 - c. Fasilitasi pengaduan program BSPS melalui Kanal Aduan BENAR-PKP
 - d. Finalisasi fitur pengaduan BSPS di BENAR-PKP
24. Pelaksanaan kegiatan Kebijakan, Strategi dan Program Bidang Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen
25. Pelaksanaan kegiatan Kebijakan Teknis, Standar dan Kriteria Pembinaan Pelaku Usaha Perumahan dan Pemangku Kepentingan Lainnya di Bidang Perumahan
- a. Penyusunan Surat Edaran Petunjuk Teknis Format dan Mekanisme Pemenuhan Kewajiban Pelaku Usaha serta Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perumahan, sebagai turunan amanat Permen PKP Nomor 18/2025 tentang Standar Kegiatan Usaha, Pelaksanaan Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perumahan
26. Pelaksanaan kegiatan Koordinasi Antar Instansi/Lembaga Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Perumahan
- a. Penandatanganan PKS antara Ditjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP dengan Ditjen AHU Kementerian Hukum tentang Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Dalam Rangka Mendukung Pembinaan Pelaku Usaha dan Perlindungan Konsumen Bidang Perumahan

27. Pelaksanaan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Usaha Perumahan dan Konsumen serta Pelaporan Kinerja
 - a. Hasil Opini Ombudsman (Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Kementerian PKP mendapatkan penilaian “Kualitas sedang” dengan nilai sebesar 76,46%
28. Pelaksanaan kegiatan Kebijakan Perencanaan dan Teknis Pengembangan Teknologi Bangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman
29. Pelaksanaan kegiatan Penyusunan NSPK Bina Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - a. Pembuatan Draf Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Kliring Teknologi (Finalisasi di TW II 2026)
 - b. Konsep Instrumen Penilaian Cepat Rumah Terdampak Bencana (Draft SOP dan Form Penilaian Cepat)
 - c. Konsep Pedoman Teknis Perencanaan Induk Kawasan dan Perencanaan Tapak Perumahan
 - d. Penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Nomor 24/KPTS/Dp/2026 tentang Tim Formatur Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan Kementerian PKP
 - e. Proses pendalaman Substansi Keputusan Menteri PKP tentang Pedoman Teknis Perencanaan Tapak dan Lantai Perumahan
30. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Dokumen Dukungan Teknis Pengembangan Teknologi dan Pengelolaan Infrastruktur Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - a. Konsep dan Data Dukung Transformasi Klinik PKP sebagai Ekosistem Digital Penyediaan Rumah Swadaya Layak Huni
 - b. Dua Konsep DED Rumah Sederhana Tipe 22/72
 - c. Kerjasama dengan Polar UI untuk kegiatan Kliring Teknologi
 - d. Pembahasan Draft Standar Operasional Prosedur (SOP) Kliring Teknologi Perumahan dengan Bagian Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman
 - e. Audiensi Produk dari PT Karya Mitra Seraya dan PT Alderon Pratama Indonesia

- f. Proses pembuatan SOP dan Form Penilaian Cepat Rumah Terdampak Bencana
31. Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kompetensi Teknis Bidang Perumahan dan Permukiman
- a. Penerbitan 8 Surat Rekomendasi Usulan Formasi Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk Kementerian PKP dan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - b. Penerbitan 35 Surat Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan
 - c. Verifikasi peserta yang direkomendasikan untuk mengikuti Uji Kompetensi JF PKP Gelombang I TA 2026
 - d. Verifikasi dokumen dan perhitungan angka kredit peserta yang lolos Uji Kompetensi JF PKP Gelombang I TA 2026 untuk penerbitan surat rekomendasi
 - e. Pelaksanaan layanan rekomendasi formasi JF PKP di daerah
 - f. Perhitungan Analisa Beban Kerja (ABK) dan pembuatan surat rekomendasi formasi JF PKP di lingkungan Kementerian PKP untuk diserahkan ke Biro SDMO
 - g. Pengembangan sistem informasi Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan
 - h. Koordinasi dengan Balai P3KP, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Pemerintah daerah terkait rencana pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Kerja Sama Sertifikasi Pekerja Konstruksi (Tukang) Mendukung Program BSPS TA 2026
 - i. Penjaringan masukan dari pihak-pihak terkait rencana lokasi pilot project Bimbingan Teknis Pekerja Konstruksi (Tukang)
32. Pelaksanaan kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Teknologi dan Akuntabilitas Kinerja
- a. Penyusunan 10 Konsep Laporan Hasil Reviu dalam rangka Pelaksanaan Advis Teknis Dukungan pengembangan teknologi dan pengembangan infrastruktur Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - b. Penyampaian Hasil Reviu terhadap Konsep Petunjuk Teknis Penyediaan, Penatausahaan, dan Pengelolaan Komponen Pra-Cetak

- untuk mendukung Pembangunan Perumahan Perdesaan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan
- c. Penyampaian Hasil Reviu terhadap 3 usulan desain Prototype Rumah Sederhana Hijau yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko
- d. Koordinasi penerapan dan Penyampaian Komitmen MR TA 2026 UPT T-2 Direktorat Bina Teknik PKP
- e. Pemantauan MR TA 2025 UPT T-1 dan T-2 Direktorat Bina Teknik PKP
- f. Pembahasan Penanganan Bencana Alam Sektor PKP untuk Pulau Sumatera khususnya Provinsi Sumatera Barat
- g. Pembahasan lanjutan Penyiapan Tugas Pembantuan Pembangunan 2.200 Unit Rumah di Provinsi Papua Pegunungan
- 33. Pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
 - a. Penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Nomor 04/KPTS/Dp/2026 Tentang Pendelegasian Wewenang Urusan Kepegawaian di Lingkungan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman
 - b. Penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Nomor 14/KPTS/Dp/2026 Tentang Pembentukan Tim Penilai Usulan Pembangunan ZI menuju wilayah bebas dari Korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun 2026
 - c. Penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Nomor 21/KPTS/Dp/2025 tentang Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DJKP Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman 2025-2029
 - d. Dukungan Kepegawaian di Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman
 - e. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman tahun 2025
 - f. Penerbitan Perjanjian Kinerja (PK) Awal TA 2026 Direktur Jenderal Kawasan Permukiman dengan para Direktur dan Kepala Balai
 - g. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman 03 Maret 2026 yaitu 81.12 atau 25.36

- h. Inventarisasi Aset Likuidasi Eks. Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR yang menjadi Rekomendasi Hasil Temuan BPK RI
- i. Pemberian arahan terhadap proses identifikasi kebutuhan layanan untuk meningkatkan dukungan manajemen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman
- j. Pemberian arahan dalam penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2025
- k. Pemberian arahan proses pengumpulan data dukung SPIP

Sedangkan pada beberapa indikator kegiatan, capaian dihitung pada Laporan Kinerja Tahunan yang bersumber dari intervensi tidak langsung dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Ditjen Kawasan Permukiman sepanjang tahun 2026, beberapa indikator tersebut antara lain:

- IKK. Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi melalui intervensi tidak langsung di wilayah pesisir;
- IKK. Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah pesisir;
- IKK. Persentase rumah tangga yang trfasilitasi skema pembiayaan perumahan yang terjangkau.

Selain itu terdapat indikator yang tercantum di Renstra, namun tidak dialokasikan pada DIPA TA 2026. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Ditjen Kawasan Permukiman pada triwulan ke I (Bulan Januari sampai Maret) 2026. Realisasi Ditjen Kawasan Permukiman TW I dapat dijabarkan sebagai berikut.

Tabel II. 5 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Ditjen Kawasan Permukiman Triwulan I

No	Kode	Program/Kegiatan/Output		Satuan	Target Tahun 2026	Pagu (Rp)	TW I			
							Target Fisik	Realisasi Fisik	Realisasi Anggaran	
									Rp	%
	Program	Perumahan dan Kawasan Permukiman								
	SP-1	Meningkatnya Hunian Layak di Kawasan Permukiman								
	IKSP-1	Persentase ketersediaan rumah layak huni		%	100		0,06	0,00		
	IKSP-2	Persentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni		%	100		0,08	0,00		
	K-1	Penyelenggaraan Sistem dan Strategi Kawasan Permukiman								
	SK-1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni								
		IKK.1 Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung		%	100		0.00	0.00		

No	Kode	Program/Kegiatan/Output		Satuan	Target Tahun 2026	Pagu (Rp)	TW I			
							Target Fisik	Realisasi Fisik	Realisasi Anggaran	
									Rp	%
		penyediaan rumah layak huni								
			7659.ABF.001 Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	2	1.631.966.000	0	0	143.645.618	8.80
			7659.PBF.001 Kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	Rekomendasi Kebijakan	20	2.440.576.000	0	0	213.085.966	8.73
			7659.BMA.001 Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Dokumen	19	1.189.734.000	0	0	186.355.516	15.66
			7659.FAE.001 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Laporan	2	643.095.000	0	0	25.167.060	3.91
		IKK.2 Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi melalui intervensi tidak langsung di wilayah pesisir		%	100		0	0.00		
			7659.BMA.001 Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Dokumen	19	1.189.734.000	0	0	186.355.516	15.66
			Jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan di wilayah pesisir		-		-			

No	Kode	Program/Kegiatan/Output		Satuan	Target Tahun 2026	Pagu (Rp)	TW I			
							Target Fisik	Realisasi Fisik	Realisasi Anggaran	
									Rp	%
			yang difasilitasi dengan sumber dana di luar APBN Kementerian PKP (unit)							
		IKK.3 Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah pesisir		%	100		0,08	0.00		
			7659.ABF.001 Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	%	100	1.631.996.000	0,08	0	143.645.618	8.80
			realisasi desa di wilayah pesisir yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Ditjen Kawasan Permukiman (Unit BSPS)	Unit	120.000		100	0		
			7659.ABF.001 Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		54	1.631.996.000	0	0	143.645.618	8.80
			Capaian Renstra Ditjen Kawasan Permukiman 2025-2029 dan Kontribusi Unor terhadap Capaian RPJMN 2025-2029 realisasi desa di wilayah pesisir yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Ditjen Kawasan Permukiman hingga memenuhi desa 100% RLH	Desa	54		0.00	0.00		
	K-2	Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana,								

No	Kode	Program/Kegiatan/Output		Satuan	Target Tahun 2026	Pagu (Rp)	TW I			
							Target Fisik	Realisasi Fisik	Realisasi Anggaran	
									Rp	%
		Utilitas Umum Kawasan Permukiman								
	SK-2	Meningkatnya perencanaan, fasilitasi penyiapan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan permukiman								
		IKK.1 Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi penyiapan lahan serta PSU		%	100		0.00	0.00		
			7659.ABF.003 Kebijakan Fasilitasi Penyiapan Lahan dan PSU Kawasan Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1.123.066.000	0	0	127.500	0.01
			7659.CBR.001 Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Fasilitasi PSU	Dokumen	2	2.470.553.000	0	0	42.863.170	1.73
			7659.FAE.002 Pemantauan dan Evaluasi Penyiapan Lahan dan PSU Kawasan Permukiman	Laporan	2	1.422.777.000	0	0	24.647.000	1.73
			7659.PEA.001 Koordinasi dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Kawasan Permukiman	Kegiatan	1	299.203.000	0.00	0	7.318.687	2.45
		IKK.2 Persentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum*		%	100		0.00	0.00		

No	Kode	Program/Kegiatan/Output		Satuan	Target Tahun 2026	Pagu (Rp)	TW I			
							Target Fisik	Realisasi Fisik	Realisasi Anggaran	
									Rp	%
			7659.RBB.001 Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	Unit	807	10.524.600.000	0	0		
		IKK.3 Persentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum hunian vertikal		%	-		-			
			7659.RBB.004 PSU Hunian Vertikal di Kawasan Permukiman	Unit	-		-			
		IKK.4 Persentase rumah tangga yang terfasilitasi skema pembiayaan perumahan yang terjangkau		%	100		8,23	5.87		
			7659.PEA.001 Koordinasi dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Kawasan Permukiman	Kegiatan	1	299.203.000	0	0		
			(BA BUN) Jumlah Rumah Tangga yang Menerima Fasilitas Pembiayaan Perumahan/ Bantuan Subsidi/ Kemudahan Perumahan 457.025 Unit selama 5 tahun	Unit	95.800		15770	11245		
	K-3	Penyediaan Rumah Layak Huni								
	SK-3	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman								

No	Kode	Program/Kegiatan/Output		Satuan	Target Tahun 2026	Pagu (Rp)	TW I			
							Target Fisik	Realisasi Fisik	Realisasi Anggaran	
									Rp	%
		IKK.1 Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas		%	100		0,04	0.00		
			7659.RBB.008 Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	Unit	120.000	2.670.000.000.000	100	0	5.365.141.146	0.2
			7659.RBB.007 Rumah Bersanitasi Layak di Kawasan Permukiman	Unit	1.000	10.800.000.000	0	0	4.944.900	0.05
		IKK.2 Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui pembangunan baru		%	100		0.00			
			7659.RBB.005 Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	Unit	0		0	0		
		IKK.3 Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi peningkatan kualitas rumah dan pengembangan kawasan permukiman		%	100	4.156.500.000	5	5	713.433.577	0.17
			7659.ABF.004 Kebijakan Penyelenggaraan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Rekomendasi kebijakan	1	765.411.000	0	0	60.314.749	7.88
			7659.AFA.003 Penyusunan NSPK Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman	NSPK	1	265.251.000	0	3	2.795.000	1.05

No	Kode	Program/Kegiatan/Output		Satuan	Target Tahun 2026	Pagu (Rp)	TW I			
							Target Fisik	Realisasi Fisik	Realisasi Anggaran	
									Rp	%
			7659.BMA.003 Data dan Informasi Kawasan Permukiman Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Dokumen	1	161.064.000	0	0	90.827.950	56.39
			7659.CBR.002 Dukungan Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Dokumen	3	2.280.553.000	0	0	169.053.071	7.41
			7659.FAE.003 Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	Laporan	4	2.616.142.000	1	1	390.442.807	14.92
	K-4	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman								
	SK-4	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman								
		IKK.1 Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui pembangunan baru (Rumah Khusus)*		%	100		0.00	0.00		
			7659.RBB.003 Rumah Khusus Kawasan Pesisir	Unit	244	80.625.340.000	0	0	47.713.526	0.06
		IKK.2 Persentase Peningkatan penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu (Rumah Susun)*		%	100		0.00	0.00		
			7659.RBB.004 Pembangunan Rumah Susun*	Unit	85	36.000.000.000	0	0	45.029.400	0.13

No	Kode	Program/Kegiatan/Output		Satuan	Target Tahun 2026	Pagu (Rp)	TW I			
							Target Fisik	Realisasi Fisik	Realisasi Anggaran	
									Rp	%
	SP-2	Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh								
	IKSP	Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh		%	100		10.00	0		
	K-1	Penanganan Permukiman Kumuh								
	SK-1	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu								
		IKK.1 Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu		%	100		0.00	0.00		
			7659.RBB.006 Penanganan Permukiman Kumuh	Hektar	75	46.755.740.000	0	0	150.884.089	0.32
	SP-3	Meningkatnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak								
	IKSP	Persentase peningkatan ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak		%	100		16,67	59.44		
	IKSP-1	Persentase pelaku usaha perumahan anggota asosiasi pelaku		%	80		25	78.32		

No	Kode	Program/Kegiatan/Output		Satuan	Target Tahun 2026	Pagu (Rp)	TW I			
							Target Fisik	Realisasi Fisik	Realisasi Anggaran	
									Rp	%
		usaha perumahan yang teregister dan terbina								
	IKSP-2	Persentase Layanan Fasilitas Pengaduan Konsumen Perumahan		%	100		25	100		
	IKSP-3	Persentase peningkatan kualitas pembinaan teknis dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman		%	100		0.00	0.00		
	K-1	Dukungan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman								
	SK-1	Meningkatnya pembinaan pelaku usaha perumahan dan perlindungan konsumen perumahan								
		IKK.1 Persentase asosiasi pelaku usaha perumahan yang teregister dan terbina		%	100		0.00	39.16		
			7659.BDB.001 Pembinaan Lembaga Pelaku Usaha Bidang Perumahan dan Fasilitas Bimbingan Teknis Konsumen Perumahan	Lembaga	4	1.082.593.000	4	4	105.065.343	9.7

No	Kode	Program/Kegiatan/Output		Satuan	Target Tahun 2026	Pagu (Rp)	TW I			
							Target Fisik	Realisasi Fisik	Realisasi Anggaran	
									Rp	%
			7659.ABF.006 Kebijakan Teknis, Standar dan Kriteria Pembinaan Pelaku Usaha Perumahan dan Pemangku Kepentingan Lainnya di Bidang Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	431.963.000	0	0	27.438.924	6.35
		IKK.2 Tingkat pencapaian pelaksanaan dan pemantauan penyelenggaraan layanan bantuan teknis dalam rangka perlindungan konsumen perumahan		%	100		85	85		
			Persentase pengaduan masyarakat yang dilayani	%	100		100	100		
			7659.AEA.001 Koordinasi Tindak Lanjut Pengaduan Konsumen Perumahan	Kegiatan	1	744.211.000	1	1	24.184.221	3.25
			7659.ABF.005 Kebijakan, Strategi dan Program Bidang Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen	Rekomendasi Kebijakan	1	134.407.000	0	0	1.415.000	1.05
			7659.ABF.006 Kebijakan Teknis, Standar dan Kriteria Pembinaan Pelaku Usaha Perumahan dan Pemangku Kepentingan Lainnya di Bidang Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	431.963.000	0	0	27.438.924	6.35
			7659.AEA.002 Koordinasi Antar Instansi/Lembaga Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Perumahan	Kegiatan	1	236.670.000	1	1	30.927.673	13.07

No	Kode	Program/Kegiatan/Output		Satuan	Target Tahun 2026	Pagu (Rp)	TW I			
							Target Fisik	Realisasi Fisik	Realisasi Anggaran	
									Rp	%
			7659.FAE.004 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Usaha Perumahan dan Konsumen serta Pelaporan Kinerja	Laporan	2	235.746.000	0	0	12.125.000	5.14
	SK-2	Meningkatnya kualitas pembinaan teknis dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman								
		IKK.1 Persentase rekomendasi kebijakan teknis pengembangan teknologi bangunan perumahan dan kawasan permukiman		%	100		0.00			
			7659.ABF.007 Kebijakan Teknis Pengembangan Teknologi Bangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RO 2025)	Rekomendasi Kebijakan	1	248.137.000	0	0	765.000	0.308
		IKK.2 Persentase regulasi (NSPK) bidang perumahan dan kawasan permukiman		%	100		0.00			
			7659.AFA.002 Penyusunan NSPK Bina Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman	NSPK	1	356.512.000	0	0	12.466.400	3.49
		IKK.3 Persentase dukungan pengembangan teknologi dan pengelolaan infrastruktur bidang		%	100		0.00			

No	Kode	Program/Kegiatan/Output		Satuan	Target Tahun 2026	Pagu (Rp)	TW I			
							Target Fisik	Realisasi Fisik	Realisasi Anggaran	
									Rp	%
		perumahan dan kawasan permukiman								
			7659.CBR.003 Dokumen Dukungan Teknis Pengembangan Teknologi dan Pengelolaan Infrastruktur Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	4	1.098.704.000	0	0	55.201.886	5.02
			jumlah dokumen dukungan teknis pengembangan teknologi bidang perumahan dan kawasan permukiman	Dokumen	1		0	0		
			jumlah dokumen dukungan teknis pengelolaan infrastruktur bidang perumahan dan kawasan permukiman	Dokumen	3		0	0		
		IKK.4 Persentase peningkatan kapasitas ASN pejabat fungsional bidang perumahan dan kawasan permukiman		%	100		0.00			
			7659.DCB.001 Peningkatan Kompetensi Teknis Bidang Perumahan dan Permukiman	Orang	200	484.616.000	0	0	5.405.323	1.12
			Jumlah ASN (JF PKP dan non JF PKP) yang mendapatkan peningkatan kompetensi teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman	Orang	150		0			

No	Kode	Program/Kegiatan/Output		Satuan	Target Tahun 2026	Pagu (Rp)	TW I			
							Target Fisik	Realisasi Fisik	Realisasi Anggaran	
									Rp	%
			Jumlah Penyelenggara Konstruksi yang mendapatkan peningkatan kompetensi teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman	Orang	50		0			
		IKK.5 Persentase hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan teknologi dan akuntabilitas kinerja		%	100		0.00			
			7659.FAE.005 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Teknologi dan Akuntabilitas Kinerja	Laporan	1	201.337.000	0		5.656.600	2.81
	Program	Dukungan Manajemen								
	SP-1	Meningkatnya Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman								
	IKSP	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman		%	86.26		21.57	18.73		
	IKSP-1	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan		%	74.1	117.320.000	18.53	18.53	325.000	0.28
			7674.EBD.Z33 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Layanan	1					
	IKSP-2	Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN		%	72.38	8.738.822.000	18.10	11.49	98.193.260	1.12

No	Kode	Program/Kegiatan/Output		Satuan	Target Tahun 2026	Pagu (Rp)	TW I			
							Target Fisik	Realisasi Fisik	Realisasi Anggaran	
									Rp	%
			7674.EBA.Z06 Layanan BMN	Layanan	20					
			7674.EBA.994 Layanan Perkantoran	Layanan	1					
			7674.EBB.951 Layanan Sarana Internal	Unit	106					
	IKSP-3	Tingkat layanan pembentukan produk hukum		%	82.1	630.560.000	20.53	20.53	31.946.675	5.07
			7674.EBA.Z01 Layanan Hukum	Layanan	1					
	IKSP-4	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana		%	75	932.415.000	18.75	18.75	43.752.300	4.69
			7674.EBC.996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Layanan	1					
			7674.EBA.Z08 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1					
			7674.EBC.Z10 Layanan Manajemen SDM	Layanan	37					
	IKSP-5	Nilai Kinerja Anggaran		%	88.5	4.495.647.000	22.13	11.18	813.085.608	18.09
			7674.EBA.962 Layanan Umum	Layanan	61					
			7674.EBD.Z23 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	1					

No	Kode	Program/Kegiatan/Output		Satuan	Target Tahun 2026	Pagu (Rp)	TW I			
							Target Fisik	Realisasi Fisik	Realisasi Anggaran	
									Rp	%
			7674.EBD.Z26 Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	1					
	IKSP-6	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI		%	100	424.283.000	25.00	42.86	447.000	0.11
			7674.EBD.Z26 Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	1					
	IKSP-7	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi		%	92.3	100.000.000	23.08	14.08	3.368.000	3.36
			7674.EBD.Z24 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan	1					
	IKSP-8	Tingkat Layanan Komunikasi Publik		%	86.25	444.320.000	21.56	21.56	2.607.500	0.59
			7674.EBA.Z02 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	1					
	IKSP-9	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi		%	100	180.091.000	25.00	12.19	21.961.674	12.19
			7674.EBA.963 Layanan Data dan Informasi	Layanan	19					
	IKSP-10	Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP		%	92	197.400.000	23.00	16.1	4.730.000	2.40
			7674.EBD.Z31 Layanan Reformasi Kinerja	Layanan	1					
	K-1	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman								

No	Kode	Program/Kegiatan/Output		Satuan	Target Tahun 2026	Pagu (Rp)	TW I			
							Target Fisik	Realisasi Fisik	Realisasi Anggaran	
									Rp	%
	SK-1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman		%	87.8					
		IKK.1 Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		%	72.38		18.10	10.00		
			7674.EBA.Z06 Layanan BMN	Layanan	20					
			7674.EBA.994 Layanan Perkantoran	Layanan	1					
			7674.EBB.951 Layanan Sarana Internal	Unit	106					
		IKK.2 Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		%	100.00		25.00	25.00		
			7674.EBC.996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Layanan	1		1	1		
			7674.EBA.Z08 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1		1	1		
			7674.EBC.Z10 Layanan Manajemen SDM	Layanan	37					
		IKK.3 Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		%	88.50		22.13	11.18		
			7674.EBA.962 Layanan Umum	Layanan	61					
			7674.EBD.Z23 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	1					

No	Kode	Program/Kegiatan/Output		Satuan	Target Tahun 2026	Pagu (Rp)	TW I			
							Target Fisik	Realisasi Fisik	Realisasi Anggaran	
									Rp	%
			7674.EBD.Z26 Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	1					
		IKK.4 Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI		%	100.00		25.00	42.86		
			7674.EBD.Z26 Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	1					
		IKK.5 Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		%	92.30		23.08	14.78		
			7674.EBD.Z24 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan	1					
		IKK.6 Tingkat Layanan Komunikasi Publik		%	86.25		21.56	21.56		
			7674.EBA.Z02 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	1					
		IKK.7 Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan		%	74.10		18.53	18.53		
			7674.EBD.Z33 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Layanan	1		1	1		
		IKK.8 Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum		%	82.10		20.53	20.53		
			7674.EBA.Z01 Layanan Hukum	Layanan	1					
		IKK.9 Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP		%	92.00		23.00	15.00		

No	Kode	Program/Kegiatan/Output		Satuan	Target Tahun 2026	Pagu (Rp)	TW I			
							Target Fisik	Realisasi Fisik	Realisasi Anggaran	
									Rp	%
			7674.EBD.Z31 Layanan Reformasi Kinerja	Layanan	1					

II.4 Permasalahan

Evaluasi kinerja merupakan realisasi pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan dalam suatu program dan kegiatan. Dalam pelaksanaannya tidak selalu sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Begitu pula dengan realisasi pelaksanaan pekerjaan yang tidak semuanya berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan target program dan kegiatan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman yang telah ditentukan sebelumnya.

Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya maka dilakukan identifikasi terhadap kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh masing – masing unit kerja yang ada di Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut. Selanjutnya perlu dilakukan identifikasi terhadap tindak lanjut sebagai langkah antisipasi agar kendala dan permasalahan tersebut tidak terjadi lagi dan perbaikan untuk pelaksanaan kerja pada periode selanjutnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan di Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman pada tahun 2026, terdapat beberapa permasalahan atau hambatan yang dihadapi. Beberapa permasalahan yang ditemukan pada masing – masing unit kerja tersebut dapat dilihat dibawah ini.

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

- Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang kesekretariatan dan humas masih belum optimal.
- Sarana dan prasarana yang belum memadai.
- Alur pengarsipan yang belum efektif
- Masih terdapat kendala yang kerap terjadi di aplikasi SIMAN
- Kurang optimalnya tindak lanjut dari Balai terkait dengan surat dari Biro, sehingga pengumpulan laporan tingkat eselon I sering terhambat
- Keterlambatan penyusunan produk hukum yang dapat menyebabkan hambatan dalam implementasi kebijakan organisasi
- Masih butuh koordinasi dengan unit kerja di dalam atau di luar DJKP dan Kementerian/Lembaga baik menyusun/membahas MoU/PKS dan penanganan pengaduan masyarakat.

- Keterlambatan penyusunan produk hukum yang dapat menyebabkan hambatan dalam implementasi kebijakan organisasi
- Pelaksanaan beberapa layanan kepegawaian belum sepenuhnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
- Realisasi anggaran pada TW I belum optimal karena sebagian kegiatan masih dalam tahap awal pelaksanaan, serta terdapat kegiatan yang sudah terlaksana namun belum diserap
- Penyesuaian perencanaan kegiatan TA 2027 Dukman untuk Balai dan Satker belum dilakukan pembagian berdasarkan proporsi
- Rekomendasi LHP 2025 belum di TL karena terkendala kelengkapan data dan proses verifikasi
- Belum terbitnya SE juknis SPI Kemen PKP

2. Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman

- Terdapat beberapa Balai dan satker yang hingga saat ini belum mengumpulkan Laporan Kinerja 2025 (LAKIP 2025).
- Proses penyusunan draf pedoman RP3KP belum dimulai, karena saat ini proses evaluasi terhadap pedoman sebelumnya masih berjalan.
- Sebagian besar program dan kegiatan lain yang terdapat di Direktorat SSPKP hingga saat ini masih dalam tahap perencanaan, yang nantinya kegiatan tersebut akan terlaksana di TW II, TW III, dan TW IV.

3. Direktorat Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman

- Perubahan alokasi anggaran BP3KP satker P3KP dikarenakan adanya perubahan Penetapan Lokasi Pembangunan PSU Kawasan Permukiman dan Pembangunan Rumah Susun di Ditjen Kawasan Permukiman.
- Belum tersusunnya NSPK secara lengkap, karena masih dalam proses pembentukan kelembagaan dan pemetaan fungsi.
- Belum ditetapkannya pembagian delineasi dan peran antarunit kerja pengampu kegiatan penyiapan lahan serta kegiatan pembiayaan dalam kegiatan pemantauan capaian pembiayaan .
- Keterbatasan ketersediaan dan kapasitas penggunaan software dan peralatan survei lapangan.

- Belum adanya kejelasan skema pemanfaatan lahan untuk pengembangan perumahan.
- Pelaksanaan verifikasi untuk bantuan pembangunan PSU masih memerlukan koordinasi antar Direktorat Jenderal Teknis lainnya.
- Bantuan Penyediaan Rumah Khusus belum lengkap administrasi serta terdapat pemasalahan berupa lahan belum clean and clear.
- Belum dilaksanakan Penyusunan LAKIP Direktorat Penyiapan Lahan dan PSU KP 2026.
- Masih adanya petunjuk teknis terkait pelaksanaan bantuan pembangunan PSU yang memerlukan penyempurnaan.
- Belum terdapat SDM dengan jabatan fungsional pembiayaan.
- Pelaksanaan Pembangunan PSU belum dilaksanakan pada TW I.

4. Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

- Terdapat masalah terkait data BNBA seperti Data CPB yang disampaikan oleh pengusul merupakan data lawas sehingga banyak usulan yang tidak memenuhi readiness criteria program BSPS dan data BNBA yang berulang
- Terdapat desa/kelurahan dengan alokasi BSPS yang kurang dari 10 unit
- Jarak antar lokasi CPB cukup jauh sehingga menghambat proses verifikasi
- Waktu yang diberikan untuk melaksanakan proses verifikasi administrasi dan teknis cukup singkat dengan jumlah tenaga fasilitator yang terbatas
- Status kepemilikan tanah CPB tidak jelas sehingga tidak dapat dilanjutkan.
- Tidak semua usulan memenuhi kriteria yang ditetapkan
- Ketersediaan air bersih yang terbatas.
- Penyusunan NSPK yang Memerlukan proses yang cukup panjang karena harus terdapat pembahasan internal maupun antar unit kerja dan unit organisasi
- Banyaknya muatan dalam juknis pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, banyak substansi yang perlu disempurnakan
- Memerlukan waktu dalam mengembangkan aplikasi Data dan Informasi Kawasan Permukiman Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman
- Dokumen yang dimiliki oleh pemda belum update, sehingga perlu perbaruan dokumen terkait dengan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman

- Data Peningkatan Kualitas Rumah dan Penanganan Kumuh masih tersebar karena belum terintegrasi dalam satu sistem
- Terdapat kegiatan belum dilaksanakan di triwulan I maupun belum dilaksanakan di tahun 2026
- Masih terdapat dokumen yang belum dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah;
- Keterbatasan anggaran pemerintah daerah untuk turut berkolaborasi terkait dengan penanganan kumuh.

5. Direktorat Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen

- Sebagian pelaku usaha yang menjadi subjek pengaduan pada sektor perumahan diketahui belum terdaftar di dalam Sistem Registrasi Pengembang (SIRENG).
- Kurangnya SDM yang menangani fasilitasi pengaduan konsumen
- Adanya kebijakan ditahun berjalan terkait pemanfaatan anggaran dan pembatasan kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan prioritas Kementerian PKP lainnya
- Kurangnya pemahaman pemangku kepentingan (Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha) akan pentingnya pembinaan pelaku usaha
- Belum adanya payung hukum yang mengatur/ mengakomodir Asosiasi sebagai bagian dari siklus perumahan
- Banyak dan beragamnya pihak yang terlibat dalam bisnis proses perumahan, seperti Kementerian Hukum, BPN, BKPM, KAN, Pemerintah Daerah, Asosiasi Pengembang Perumahan, perbankan, BP TAPERA dan aparat penegak hukum.
- Pengawasan dan pengendalian kepatuhan pelaku usaha perumahan saat ini belum sistematis dan konsisten sehingga tindak lanjut atas hasil pengawasan dan pengendalian maupun indikasi pelanggaran masih terbatas.
- Penggunaan data kementerian lain (Ditjen Pajak, BKPM OSS) belum sepenuhnya terakomodasi dan masih dalam proses

6. Direktorat Bina Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Terdapat kegiatan belum dilaksanakan di triwulan I

- Komplikasi substansi yang membutuhkan waktu lebih banyak untuk pendalaman pemahaman
- Proses koordinasi dan perbaikan yang dilakukan secara berulang dengan Bagian Hukum DJKP dan Biro Hukum Kementerian PKP dalam penyusunan SK sehingga penerbitan SK menjadi tertunda.
- Penyusunan Draft Standar Operasional Prosedur (SOP) Kliring Teknologi Rancang Bangun Perumahan membutuhkan waktu yang lama dan melibatkan banyak pemangku kepentingan (internal dan eksternal)
- Pelaksanaan PKS dengan Polar UI membutuhkan prosedur berjenjang sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama
- Belum ada timbal balik terhadap produk perusahaan yang diaudiensikan
- Melanjutkan pengembangan sistem informasi TA.2025 masih terkendala perihal metode pengadaan tenaga eksternal.
- Proses legalisasi dokumen kerja sama yang tidak mudah sehingga diperlukan pembahasan berulang kali baik di lingkup internal maupun eksternal.
- Melanjutkan pengembangan DED Rumah Layak Huni TA.2025 yang diperuntukkan untuk usulan Kepmen 2947.
- Dokumen pendukung yang diverifikasi untuk perhitungan angka kredit dalam penerbitan surat rekomendasi peserta Uji Kompetensi JF PKP Gelombang I TA 2026 tidak lengkap sehingga kesulitan dalam menghitung angka kredit, dan berdampak pada waktu yang akan semakin lama dalam menerbitkan surat rekomendasi
- Klasterisasi Analisis Beban Kerja (ABK) terlalu variatif
- Lokasi pilot project bimbingan teknis diarahkan pada lokasi BPS wilayah aspirasi DPR RI (Jawa Tengah) untuk dapat dikerjasamakan dengan BJKW Wilayah IV Surabaya.
- Keterbatasan anggaran pelaksanaan bimbingan teknis terutama untuk akun anggaran perjalanan dinas kegiatan bimbingan teknis ini.
- Pelaksanaan Bimbingan Teknis belum sepenuhnya berjalan efektif
- Rendahnya mutu rekomendasi teknis pelaksanaan inspeksi dan advis teknis

- Proses perencanaan dan pelaksanaan penanganan bencana melibatkan banyak pihak sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama.
- Inpres Pembangunan 2.200 Unit belum terbit hingga saat ini dan belum melakukan lelang pekerjaan

Dengan diidentifikasinya beberapa permasalahan yang ditemukan pada masing – masing unit kerja diatas, maka dilakukan perumusan rencana mekanisme tindak lanjut yang juga dilakukan oleh masing – masing unit kerja yang ada di Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman seperti yang telah dilampirkan pada bagian berikutnya.

BAB III PENUTUP

III.1. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dari hasil capaian target kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Triwulan I dapat dilihat sebagai berikut.

1. Sekretariat Jenderal Kawasan Permukiman
 - a. Memantau progres PSP BMN melalui aplikasi SIMAN secara berkala serta mempercepat penyusunan dan penyampaian laporan capaian triwulanan Sekretariat Ditjen;
 - b. Mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan TA 2026, meliputi pengadaan belanja modal, penerbitan SE pertanggungjawaban, serta pembinaan dan asistensi Balai;
 - c. Memperkuat koordinasi lintas unit dan pemangku kepentingan, termasuk tindak lanjut rekomendasi dan pengelolaan data;
 - d. Melakukan evaluasi kelembagaan serta penataan organisasi;
 - e. Memenuhi dan meningkatkan kapasitas SDM melalui usulan jabatan fungsional, pelatihan, serta pemanfaatan program magang;
 - f. Mendukung fungsi komunikasi publik, pengarsipan, serta penyediaan sarana prasarana yang dibutuhkan;
 - g. Mengikuti dan menyesuaikan kebijakan SPI melalui penyusunan juknis dan partisipasi dalam bimtek.
2. Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
 - a. Penyusunan Revisi Permen RP3KP dijadwalkan FGD lanjutan tanggal 16 April 2026;
 - b. Pembinaan Teknis Terkait Program dan Anggaran kepada Balai dan Satker TA 2026 & TA 2027 dilaksanakan setelah TW I;
 - c. Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pelaksanaan Klinik PKP TA 2026 direncanakan setelah TW I;
3. Direktorat Penyiapan Lahan dan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman
 - a. Menyusun data awal rencana strategis 5 tahun serta melakukan pengumpulan data dan pelaporan progres secara berkala sebagai dasar perencanaan dan penganggaran;

- b. Menyempurnakan NSPK, petunjuk teknis, serta kelengkapan administrasi usulan (termasuk penetapan lokasi, TOR, dan RAB) disertai pembinaan dan pelatihan;
 - c. Menetapkan delineasi dan lingkup kegiatan serta melaksanakan verifikasi dan pembahasan bersama stakeholder terkait;
 - d. Melaksanakan koordinasi lintas pihak dalam pematangan lahan, business matching, serta pemantauan pembiayaan (termasuk dengan BP Tapera);
 - e. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan serta penguatan jabatan fungsional terkait pembiayaan;
 - f. Mendukung pelaksanaan kegiatan melalui pembukaan usulan (SIBARU), penerbitan perintah verifikasi PSU, pelaksanaan verifikasi (termasuk hunian tetap), serta penyusunan TOR/RAB dan usulan alokasi bantuan rumah susun.
4. Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman
- a. Melakukan koordinasi dengan pengusul dan pemerintah daerah untuk penggantian CPB/BNBA, penyelesaian status lahan, serta pemenuhan dan pembaruan dokumen (ditargetkan selesai paling lambat 17 April 2026);
 - b. Mengoptimalkan perencanaan alokasi bantuan dengan prinsip minimal 10 unit per desa, disertai justifikasi teknis untuk kondisi khusus, serta penyusunan skala prioritas dan pelibatan CSR;
 - c. Mengoptimalkan sumber daya pelaksanaan melalui pemanfaatan fasilitator, ASN/CPNS sebagai TFL, serta pengaturan waktu kerja untuk menjangkau lokasi terpencil;
 - d. Menjamin kesiapan lahan dan aspek teknis melalui pengurusan bukti kepemilikan tanah, pendaftaran ke BPN, serta penyesuaian desain dengan kondisi lapangan (termasuk penyediaan air bersih);
 - a. Melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan serta menindaklanjuti hasil evaluasi triwulan;
 - b. Mengembangkan dan mengoptimalkan aplikasi SIBANGKIM sebagai pusat data dengan dukungan pemanfaatan teknologi.
5. Direktorat Bina Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman
- a. Melaksanakan pembahasan kajian strategis (buku Rumah Terjangkau), pengembangan sistem monitoring-evaluasi, serta penyusunan rekomendasi teknis program perumahan dan kawasan permukiman;

- b. Mempercepat penyusunan dan finalisasi regulasi/dokumen teknis (NSPK, SOP, Kepmen, Juknis) melalui koordinasi intensif dengan Bagian Hukum dan pemangku kepentingan;
 - c. Memperkuat kolaborasi dengan pakar, perguruan tinggi (UI), serta stakeholder lain dalam penyusunan substansi teknis dan penyediaan dukungan keahlian;
 - d. Mengembangkan sistem dan inovasi, termasuk sistem informasi, instrumen penanganan bencana, serta mekanisme penilaian dan tindak lanjut hasil audiensi;
 - e. Meningkatkan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis, uji kompetensi JF PKP, pengelolaan ABK, serta pengembangan sistem pendukung;
 - f. Mendorong pelaksanaan program prioritas (BSPS, rumah layak huni, penanganan bencana, rumah swadaya) melalui koordinasi lintas pihak, skema pembiayaan, dan percepatan implementasi.
6. Direktorat Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen
- a. Melakukan penyesuaian target DIPA TW II sesuai Renstra serta optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan dukungan teknologi informasi dan efisiensi anggaran;
 - b. Menyusun dan memfinalisasi regulasi sektor perumahan (Juknis PBBR dan rancangan Permen PKP) melalui tahapan penyusunan, uji publik, dan harmonisasi;
 - c. Meningkatkan layanan dan perlindungan konsumen melalui bimtek petugas, pelibatan BP3KP, serta sosialisasi pedoman dan peraturan terkait;
 - e. Memperkuat koordinasi dan sinergi lintas kementerian/lembaga serta stakeholder, termasuk kerja sama pemanfaatan data pelaku usaha;
 - f. Mengembangkan dan menguji instrumen pemantauan kepatuhan pelaku usaha berbasis sistem (SIRENG).

LAMPIRAN

Rapat Rancangan Produk Hukum Dit. BINUS (16 Februari 2026)



Pengembangan Tools Digitalisasi Proses Bisnis BSPS



Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman (09 April 2026)



Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penyusunan Program dan Anggaran Bidang Lapsu

Bukti Verifikasi Sanitasi di Kota Kupang



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

SUB KOMPONEN

PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN BIDANG
PENYIAPAN LAHAN DAN PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS UMUM KAWASAN PERMUKIMAN
(SWAKELOLA)

TAHUN ANGGARAN 2026

MENGETAHUI :

Direktur Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana,
dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman

Indra Gunawan, S.T., M.H.QRMPP
NIP. 19811016 200903 1 005

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT PENYIAPAN LAHAN DAN PRASARANA, SARANA, DAN
UTILITAS UMUM KAWASAN PERMUKIMAN



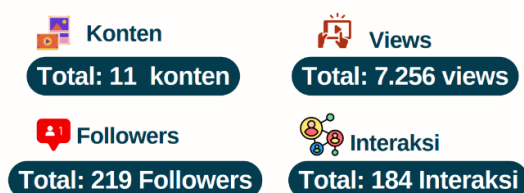
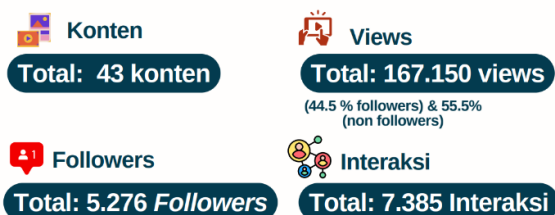
Laporan Evaluasi Sosial media DJKP (06 Maret 2026)

Executive Summary



• Pada bulan Februari 2026, telah dilakukan berbagai macam publikasi konten media sosial Instagram lingkungan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

• Konten yang dipublikasikan bersumber dari berbagai kegiatan, seperti kegiatan kunjungan kerja pimpinan Ditjen Kawasan Permukiman, rapat, infografis edukasi, polling, kuis, fakta menarik seputar perumahan, dan lainnya.



INSTAGRAM | @PKP_KAWASANPERMUKIMAN TIKTOK | @ditjenkp



KEMENPKP
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN TRIWULAN I

DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

2026

